



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI JAWA
TIMUR TAHUN 2017)**

SKRIPSI

Oleh :

DEWI MALSI UKAMAGA

140810301107

PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI JAWA
TIMUR TAHUN 2017)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh

**Dewi Malsi Ukamaga
NIM 140810301107**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Akhmad Mulyadi yang telah tenang disisiNya dan Ibundaku Halimah tercinta, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, nasihat, materi dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah untuk keberhasilanku;
2. Kakak-kakakk Doli Alfa Satria Hadi dan (Almh.) Okta Dwi Olanda tercinta, terima kasih atas dukungan, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan doa yang telah diberikan selama ini;
3. Guru-guruku dari TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa sabar;
4. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Allah selalu menjawab doa dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya; kedua, menundanya; ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik lagi”

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”

(Abu Bakar Sibli)

“Always be yourself, no matter what they say and never be anyone else even if they look better than you”

“If you want success, but you avoid the effort to achieve success by reason of fear of failure, then your fear is fear to be successful”

(Professor Schein)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Malsi Ukamaga

NIM : 140810301107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018
Yang menyatakan,

Dewi Malsi Ukamaga
NIM 140810301107

SKRIPSI

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI JAWA
TIMUR TAHUN 2017)**

Oleh

**Dewi Malsi Ukamaga
NIM 140810301107**

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing II : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017)

Nama Mahasiswa : Dewi Malsi Ukamaga

Nomor Induk Mahasiswa : 140810301107

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 17 Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani, Msi, Ak.

Drs. DjokoSupatmoko, M.M,Ak.

NIP. 19670102 199203 2002

NIP. 19550227 198403 1001

Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulisty SE, M. Si, Ak

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

PENGARUHPERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dewi Malsi Ukamaga

NIM : 140810301107

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 JULI 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan panitia penguji

1. Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak. ()
NIP.19600103 199103 1001
2. Sekertaris : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak, ()
NIP. 19710217 200003 1001
3. Anggota : Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak. ()
NIP. 19691011 199702 2001



Mengetahui / Menyetujui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember
Pelaksana Harian Dekan,

Dr. Zainuri, M.Si

NIP. 19640325 198902 1 001

Dewi Malsi Ukamaga

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah pemerintahan yang ada di Jawa Timur dengan kriteria pemerintahan yang berbentuk kabupaten di Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode dokumentasi untuk melihat laporan realisasi anggaran yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan untuk memperoleh data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur untuk memperoleh data pertumbuhan ekonomi. Uji yang dilakukan pada penelitian ini uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menggunakan T-test pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Dewi Malsi Ukamaga

Accounting Departement, Economic and Bussines Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to determine whether economic growth, local revenue, and general allocation affect the allocation of capital expenditure budgets in districts in East Java. The population in this study is the district / city government in East Java Province. The sample of this study is the government in East Java with the criteria of governance in the form of regencies in East Java. This type of research is quantitative research that functions to determine the amount or magnitude of an object to be studied. Data sources used in this study are secondary data with documentation method to see budget realization reports that have been published by the Directorate General of Financial Balance to obtain data on local revenue, general allocation funds and those published by the East Java Statistics Agency to obtain growth data economy. Tests conducted in this study test for normality, classical assumption test and hypothesis testing. The results of the study using the economic growth T-test affect the allocation of capital expenditures, while local revenue and general allocation funds do not affect the allocation of capital expenditure.

Keywords: *Capital Expenditures, Economic Growth, General Allocation Funds, Regional Original Revenues*

RINGKASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017), Dewi Malsi Ukamaga, 140810301107; 2018; 49 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk,2008 dalam Sulistyowati, 2011).

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif (Ardhani, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di kabupaten yang ada di Jawa Timur pada tahu 2017. Populasi dalam penelitian ini adalh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah pemerintahan yang ada di Jawa Timur dengan kriteria pemerintahan yang berbentuk kabupaten di Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan untuk

memperoleh data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur untuk memperoleh data pertumbuhan ekonomi. Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan data historis yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka.

Pengujian dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan program SPSS. Uji yang dilakukan pada penelitian ini uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hipotesis 1, 2 dan 3 menggunakan uji T-tes. Hasil penelitian pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

SUMMARY

Influence of Economic Growth, Local Original Income (PAD), And General Allocation Fund (DAU) to Allocation of Capital Expenditure Budget (Case Study at Regency Government in East Java 2017), Dewi Malsi Ukamaga, 140810301107; 2018; 49 pages; Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Jember.

Regional budget is a financial plan that is used as guidance of local government in providing services to the public. In Indonesia, local budgets are commonly referred to as the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). All receipts and expenditures of the Regional Government either in the form of money, goods and services in the budget year to be budgeted in APBD (Kawedar et al, 2008 in Sulistyowati, 2011).

The budgeting process begins with the two parties, namely between the executive and the legislature to make an agreement on the general policy of APBD which is the basis for the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget. The executive has the duty to draft APBD according to the policy, and then the legislative party stipulates it as the previous Regional Regulation. In agency theory, local regulation becomes a legislative tool to oversee the execution of budgets run by the executive (Ardhani, 2011).

This study aims to determine whether the influence of economic growth, local revenue and general allocation funds (on the allocation of capital expenditures in districts in East Java in 2017. The population in this study adalh district government in East Java Province. The sample of this study is the existing government in East Java with the criteria of government in the form of districts in East Java. This type of research is quantitative research. The type of data used in this study is secondary data that has been published by the Directorate General of Fiscal Balance to obtain data on local revenue, general allocation funds and which have been published by the Central Bureau of Statistics of East Java to obtain data on economic growth. Methods of data collection in research is historical data collected by documentation method and literature stud.

The test in this research is assisted by using SPSS program. Test conducted in this study normality test, test the classical assumption and hypothesis test. Hypotheses 1, 2 and 3 use the T-test. The results of the economic growth study have an effect on the allocation of capital expenditure, while the local revenue and general allocation funds have no effect on the allocation of capital expenditure



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendak-Mu lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Ayahku Akhmad Mulyadi dan kakak keduaku Okta Dwi Olanda yang telah tenang disisiNya, ibundaku Halimah dan kakak pertamaku Doli Alfa Satria Hadi yang kucinta, terimakasih atas segala nasihat, curahan kasih sayang, materi, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya yang telak mengiringi setiap langkah keberhasilanku;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Agung Budi Sulisty SE, M. Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M. Com, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Novi Wulandari W., SE, M. Acc. Fin., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan;
9. Seluruh Guru-Guru dari TK hingga SMA serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan;
10. Yashinta Putri Utami, Silvana Faiqoh, Agnes Febiola, Hilda Putri dan Tia Octaviani sahabat-sahabat perkuliahan tersayang yang selama ini selalu menghibur, mendukung, menjadi pendengar yang baik serta memberi semangat selama ini;
11. Teman-teman survivor Silvana, Agnes, Rika Juliana, Irsyad Azhar, Azis Fajar, Fathur, Akbar Fathoni, Angga Riski dan Scherrygo yang telah menemani, memberi masukan dan mendukung selama 2 periode HMJA;
12. Teman-teman dikosan dan di kampus Diana Oktafitria, I'anatun Nikmah dan Aprilia Eka yang telah mendukung, menjadi pendengar yang baik dan memberi semangat selama ini;
13. Fitri Aulia R, Septyan, Kholillah (Ulil), Airin, Dinda, Cici, Ninis, Lutfu, Diah, Arsyila, Irsa, Gede, Hardi, Bagas, Dayat, Anas, Dea, Syeril, Agil, serta adik tingkat angkatan 2015 dan 2016 lainnya yang banyak membantu saat organisasi dan memberikan semangat selama ini;
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Periode 2015 dan 2016 serta Laskar Akreditasi yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dan berkesan;
15. Teman-teman KKN UMD 22 Faridatul Isnayah, Mega Shopie, Cita Nindi, Hilma, Maulida, Reno Iwan, Haris, Muklas Adi dan Dimas yang memberi pengalaman dan kenangan selama 45 hari;
16. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2014 terima kasih untuk semua kenangan selama perkuliahan terutama Yayik, Monita, Kartika, Wilda, Aprilia Romauli, Debby, Riza Bella, Taufik, Ubay, Evan, Panji, Andi, Renda, Osti, Nia;

17. Teman-teman yang selama ini memberikan kritikan negatif yang tidak secara langsung, terima kasih karena penulis telah menerima semua kritikan tersebut dan membuat penulis menjadi termotivasi dan sadar bahwa di dunia ini tidak semua orang yang terlihat baik, itu baik;
18. Serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini telah memberikan hiburan, memberikan motivasi, serta memberikan semangat saat proses penulisan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN BIMBINGAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1

1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.2 Belanja Modal	11
2.3 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)	15
2.6 Hubungan Teori Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik	15
2.7 Penelitian Terdahulu	16
2.8 Kerangka Konseptual.....	23
2.9 Hipotesis Penelitian.....	24
2.9.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Peralokasian Belanja Modal.....	24
2.9.2 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Peralokasian Belanja Modal	25
2.9.3 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Peralokasian Belanja Modal	26
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	28
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	29
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	30
3.5.2 Variabel Independen (X)	30

3. 6 Metode Analisis Data	31
3.6.1 Analisis Data.....	31
3.6.2 Teknik Analisis	31
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4. 2 Analisis Deskriptif	37
4. 3 Pengujian Asumsi Klasik	38
4.3.1 Uji Normalitas Data	38
4.3.2 Uji Multikolinieritas	39
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	40
4. 4 Pengujian Hipotesis	41
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	41
4.4.2 Analisis Determinasi	42
4.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	42
4.4.3 Uji Individu (Uji t).....	43
4. 5 Pembahasan	43
4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.....	43
4.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.....	44
4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.....	45
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5. 1 Kesimpulan	46
5. 2 Keterbatasan	46
5. 3 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

LAMPIRAN..... 51

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	20
4.1 Tabel Hasil Pemilihan Sampel	36
4.2 Tabel Analisis Deskriptif	37
4.3 Tabel Uji Normalitas.....	39
4.4 Tabel Uji Multikolinieritas.....	40
4.5 Tabel Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.6 Tabel Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
4.7 Tabel Analisis Determinasi	42
4.8 Tabel Hasil Uji F.....	42
4.9 Tabel Hasil Uji t.....	42

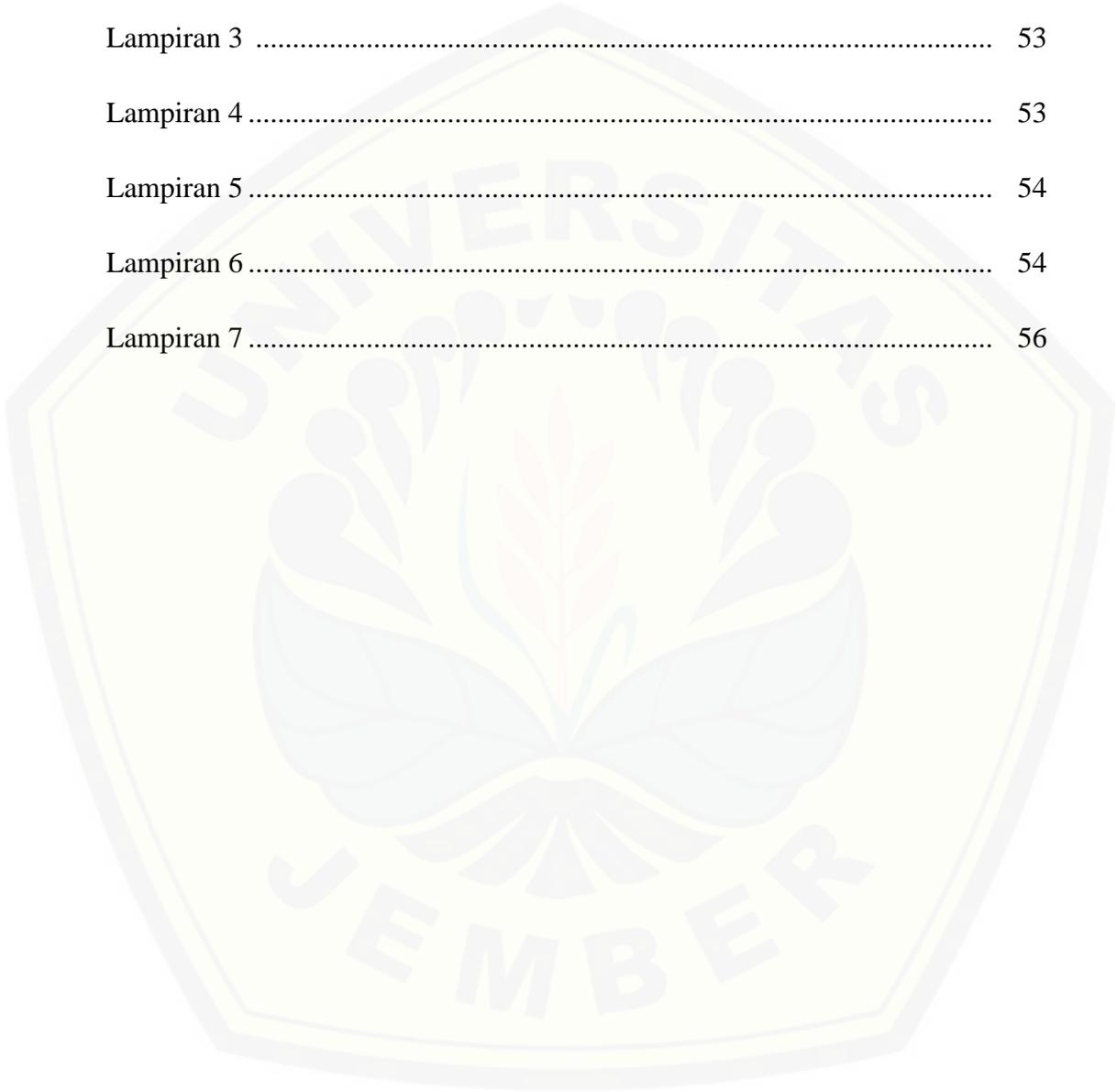
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual	23
3.1 Kerangka Pemecah Masalah	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	51
Lampiran 2	52
Lampiran 3	53
Lampiran 4	53
Lampiran 5	54
Lampiran 6	54
Lampiran 7	56



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk,2008 dalam Sulistyowati, 2011). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008) dalam Sulistyowati (2011), APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif (Ardhani, 2011).

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke

dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993 dalam Sulistyowati, 2011). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008 dalam Sulistyowati, 2011). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008 dalam Sulistyowati, 2011).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih

mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004 dalam Ardhani, 2011). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008 dalam ardhani, 2011). Dengan adanya peningkatan PAD

diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik (Ardhani, 2011).

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) dalam Ardhani (2011) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan

yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani, 2011).

Kondisi keuangan daerah kota dan kabupaten di Indonesia mempunyai tingkat varian yang tinggi. Disparitas kemampuan keuangan antar daerah merupakan sesuatu yang alami yang terjadi di semua Negara di dunia. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah Pusat dalam upaya mengurangi ketimpangan fiskal telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ardhani (2011) hasil penelitian yang didapatkan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014), namun hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kholifah (2013) hasil penelitian yang

didapatkan oleh Kholifah (2013), pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2013), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini (2014), namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011), menunjukkan PAD tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyowati (2011) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mufida (2016), hasil penelitian yang didapatkan oleh Mufida (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Jawa Timur adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah provinsi Jawa Barat. Provinsi ini memiliki penduduk yang mencapai 38,85 juta jiwa berdasarkan data tahun 2015. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, tidak mengherankan kalau Jawa Timur memiliki banyak wilayah urban atau perkotaan. Saat ini terdapat sembilan wilayah perkotaan di Jawa Timur. Kota Surabaya menduduki urutan pertama sebagai kota terbesar di provinsi Jawa Timur. Surabaya terbesar dalam hal jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi. Pada tahun 2015 pendapatan per kapita terbesar di provinsi Jawa Timur dipegang oleh kota Kediri. Kota yang terkenal dengan industri rokoknya ini memiliki pendapatan per kapita yang mencapai 348,010 juta rupiah. Di Indonesia sendiri Kediri merupakan kota dengan pendapatan per kapita terbesar kedua setelah kota Bontang. Posisi kedua dipegang oleh kota Surabaya. Kota yang menjadi ibukota provinsi Jawa Timur ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 142,596 juta rupiah. Kota

Surabaya masuk dalam daftar 5 besar kota dengan pendapatan per kapita terbesar di Indonesia (<http://blogkotakita.blogspot.com>).

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi Pemprov Jatim sepanjang tahun 2015 jauh melampaui nasional. Jika realisasi pendapatan asli negara dari sektor pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah pusat tahun 2015 hanya 84,5 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD Pemprov Jatim tembus 101,74 persen dari target dipatok. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Jatim, Bobby, tahun 2015, target PAD yang dibebankan kepada Dispenda Rp 12.348.880.000.000 (Rp 12,3 triliun). Dari target itu, hingga 31 Desember realisasinya mencapai Rp 12.563.984.952.643 (Rp 12,5 triliun) atau 101,74 persen (surabaya.tribunnews.com).

Di tahun 2016, perekonomian Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 5,55 persen. Angka ini jauh lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional 2016 yang tercatat 5,02 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov Jatim, Teguh Pramono, saat konferensi pers tentang pertumbuhan ekonomi Jatim 2016 di kantornya mengatakan, dari sisi kategori, semua kategori aktivativats perekonomian tumbuh positif. Tertinggi terjadi pada kategori pertambangan dan penggalian yang tercatat tumbuh 14,18 persen. Berikutnya diikuti oleh kategori penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 8,49 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh aktivitas ekspor yang tercatat sebesar 12,83 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, mengalami kontraksi -25,58 persen. Hal ini diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor yang kontraksinyaterecatat 1,20 persen. Menurut Teguh, jika diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga dasar berlaku, perekonomian Jatim 2016 tercatat Rp 1.855,04 triliun. Sementara jika diukur atas dasar harga konstan ekonomi Jatim mencapai Rp 1.405,25 triliun (<http://kominfo.jatimprov.go.id>).

Pendapatan perkapita penduduk Jatim tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 51,600 juta lebih atau sekitar 4.030 USD. Tahun 2018 diprediksi naik sekitar 30,5 persen atau sekitar Rp 56,800 juta atau 4.030 dollar AS. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 47,470 juta atau 3.598 USD. Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) mengatakan, Naiknya pendapatan perkapita itu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim, dan ikut mengdongkrak pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Jatim tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 1.950 - 2.000 triliun dengan laju inflasi 3,8 persen. Sedangkan pertumbuhan diprediksi sebesar 5,2-5,4 persen. Beliau juga menjelaskan, perdagangan antar daerah dan antar provinsi memiliki peran yang strategis bagi perekonomian daerah maupun nasional. Perdagangan antar daerah memperkuat pasar dalam negeri dengan kontribusinya sebesar 21 persen. Kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan karena kerja sama perdagangan ini terbuka dan saling menguntungkan. Melihat potensi perdagangan antar daerah yang saling menguntungkan, maka Jawa Timur mendirikan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 Provinsi di Indonesia. Keberadaan KPD memperkuat logistik dan konektivitas antar daerah, termasuk meringankan biaya perdagangan antar daerah (<http://kadinsurabaya.or.id>).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, pada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten di Jawa Timur.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama dan sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. (bungrandhy.wordpress.com).

Menurut Yovita (2011) dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen, dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Mursalim (2005) dalam Bangun (2009), dalam Yovita (2011) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

2.2 Belanja Modal

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006 dalam Ardhani 2011). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985

dalam Ardhani, 2011). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Ardhani, 2011).

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Potensi pendapatan daerah sering lebih rendah

dan biaya pengumpulan yang tinggi dibandingkan dengan banyaknya pajak Pemerintah Pusat.

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun yang masuk dalam Objek Retribusi pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 terdiri dari : Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 ayat 4, berbunyi lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Peraturan Pemerintah No.55/2005). Penelitian David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) dalam Ardhani (2011) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dalam Ardhani (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara pemberian DAU dengan alokasi belanja modal.

2.6 Hubungan Teori Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu,

kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Yovita, 2011).

Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan dana hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Di sinilah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik (Yovita, 2011).

2.7 Penelitian Tedahulu

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) yang meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007-2009. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus

(DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sulistiyowati (2011) meneliti Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kab/Kota di Jawa dan Bali yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 hingga tahun 2010 kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 168 Kab/Kota. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Yovita (2011) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia dari tahun 2008-2010. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Kholifah (2013) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan). Penelitian ini menggunakan 50 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2010 dengan menggunakan metode purposive sampling. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan uji t, uji f, dan uji koefisien

determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dan tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Priambudi (2013) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. Data penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013, diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013 dengan pengecualian pada Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura dengan jumlah kabupaten dan kota yaitu 108. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Martini, dkk (2014) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dan objeknya adalah Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan dengan pencatatan dokumen, serta dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan (1) ada pengaruh

positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (2) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (3) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (4) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (5) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum, serta (6) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Dana Alokasi Khusus.

Mayasari, dkk (2014) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2011-2013 berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buleleng. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Mufida (2016) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel independen penelitian yakni PAD, DAU, DAK. Sedangkan variabel dependennya yakni Belanja Modal. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 38 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data diperoleh dengan cara mendokumentasikan dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah dipublikasikan. Periode pengamatan dalam penelitian ini selama 5 tahun yaitu tahun 2010-2014 dimana data penelitian (n) sebanyak 190 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independen Dan Variabel Dependen	Metode Analisis Data	Hasil
1	Pungki Ardhani (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi.	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Analisis Regresi Berganda	Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal. Secara Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal.
2	Diah Sulistyowati (2011)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap	Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Variabel	Analisis Regresi Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh

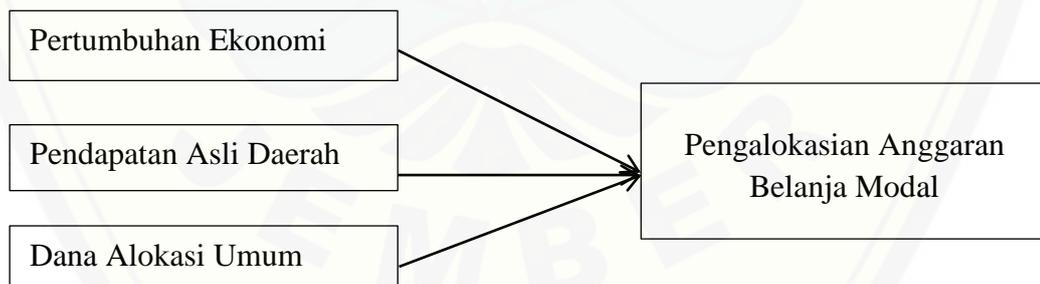
		Alokasi Belanja Modal. Skripsi.	Dependen: Belanja Modal.		Negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal.
3	Farah Marta Yovita (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi.	Variabel Indipenden: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum. Variabel Dependen: Belanja Modal	Analisis Regresi Berganda	Pertumbuhan Ekonomi Yang Di Proksikan Ke Dalam PDRB Berpengaruh Signifikan Positif Dan DAU Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal, Sedangkan PAD Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal
4	Inayatul Kholifah (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Luas Wilayah Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan). Skripsi.	Variabel Indipenden: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Luas Wilayah. Variabel Dependen: Belanja Modal	Analisis Regresi Berganda	Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Luas Wilayah Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal.
5	Wimpi Priambudi (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	Variabel Indipenden: Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana	Analisis Regresi Sederhana, Dan Analisis	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

		Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Skripsi	Alokasi Umum. Variabel Dependen: Belanja Modal	Regresi Berganda.	positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
6	Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, I Wayan Suwendra (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012. Jurnal.	Variabel Indipenden: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Variabel Dependen: Belanja Modal	Analisis Jalur	(1) ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (2) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (3) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (4) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (5) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum, serta (6) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Dana Alokasi Khusus.
7	Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	Variabel Indipenden: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana	Analisis Regresi Berganda	Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

	Yuniarta (2014)	Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Jurnal.	Alokasi Umum. Variabel Dependen: Belanja Modal		terhadap Belanja Modal.
8	Binti Amaliyah Mufida (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.	Variabel Indipenden: PAD, DAU, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh.

2.8 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami konseptual penelitian ini, maka digambarkan kerangka konseptual yang dapat diuraikan secara sistematis dari permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal (Yovita, 2011).

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya.

Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran (Yovita, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal yang dilakukan oleh Ardhani (2011), Priambudi (2013), dan Mayasari, dkk (2014), mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kholifa (2013) mendapatkan hasil bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2.9.2 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Yovita (2011) mengatakan bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007 dalam Yovita,

2011). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Kholifa (2013), Mufida (2016) Martini, dkk (2014), yang hasilnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

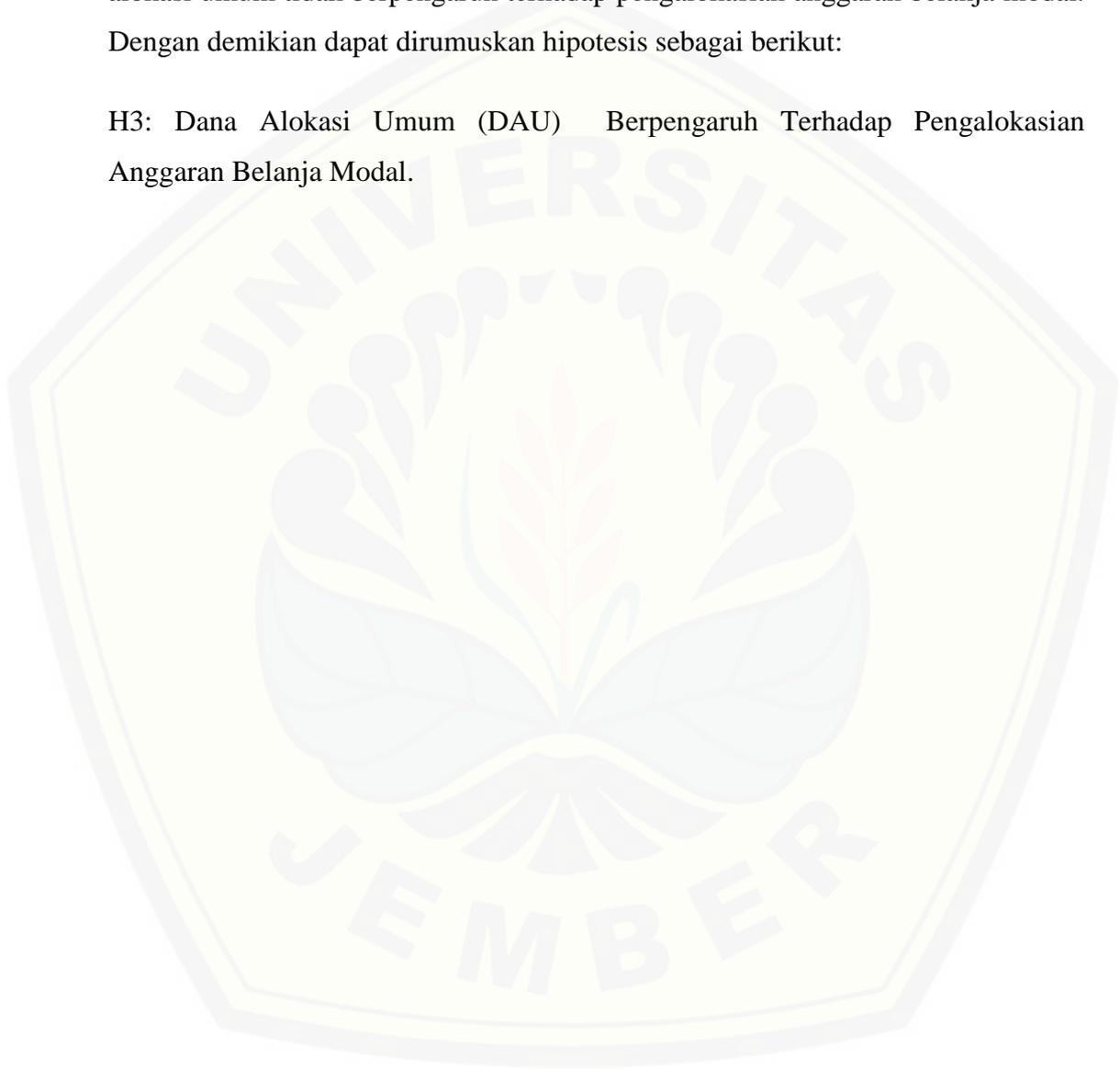
2.9.3 Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalokasian Belanja Modal

Menurut *Agency Theory* dalam Yovita (2011), hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007 dalam Yovita 2011)

Berdasarkan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Sulistiyowati (2011) dan Yovita (2011) yang hasilnya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mufida (2016) mendapatkan hasil dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:7), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Tujuannya untuk memahami dan mengetahui tingkat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan metode yang telah ditetapkan dalam penelitian kuantitatif.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik suatu populasi (Sugiyono, 2012:389). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Artinya, sampel dipilih dengan menggunakan teknik penetapan sampel yang dikehendaki peneliti, sehingga peneliti tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah yang berbentuk kabupaten di Jawa Timur. Penelitian ini mengambil sampel/data dari laporan realisasi APBD yang di dapatkan melalui www.djpk.kemenkeu.go.id untuk memperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, PAD, dan DAU, dan melalui <https://jatim.bps.go.id/> untuk memperoleh data pertumbuhan ekonomi berupa PDRB per kapita berdasarkan nilai konstan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif yang berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya yang melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode dokumentasi. Peneliti akan memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan melalui www.djpk.kemenkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tersebut diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, PAD, dan DAU. Variabel pertumbuhan ekonomi berupa PDRB per kapita berdasarkan nilai konstan diperoleh dari BPS melalui <https://jatim.bps.go.id/>.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur variabel. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan berbagai macam nilai. Variabel akan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasikan dalam *construct*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal (Y). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal (Y) meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

3.5.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2), Dana Alokasi Umum (DAU) (X_3).

1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi (X_1) merupakan proses kenaikan output per kapita diproksi dengan PDRB per kapita, data BPRD diperoleh dari BPS. (Boediono, 1985 dalam Ardhni, 2011).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) (X_3)

Dana Alokasi Umum (DAU) (X_3) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data

Menurut Sunyoto (2011:24) analisis data terdiri dari ;

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis non statistik yang membantu dalam penelitian yang kemudian ditafsirkan dengan baik.

2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh.

Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, maka peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis.

3.6.2 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini

variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variasi pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol (Ghozali 2011:160).

Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikasinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji normalitas data ini biasanya dilakukan dengan pengujian melalui *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) yang secara otomatis nilai *kolmogorov-smirnov* akan muncul.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Data terdistribusi secara normal

H_1 : Data tidak terdistribusi secara normal

Jika nilai sign $> 0,05$ maka sampel terdistribusi normal, jika sign $< 0,05$ maka sampel tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan Uji *Varians Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013:33).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya adalah dengan uji glejser, yaitu apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:35).

c. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas secara bersamaan yang sudah diketahui besarnya. Adapun persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_x$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = Pendapatan Asli Daerah

X₃ = Dana Alokasi Umum

a = konstanta

e = error

b = angka arah atau koefisien yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

2) Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi yang digunakan adalah sig $\alpha < 0,05$.

R^2 diperoleh dengan mengkuadratkannya.

$$R^2 = \boxed{r^2 \times 100\%}$$

3) Uji F (Fisher)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), maka dapat memberi kesimpulan bahwa semua variabel independent yang diteliti secara bersama-sama dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel dependent.

4) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), dan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

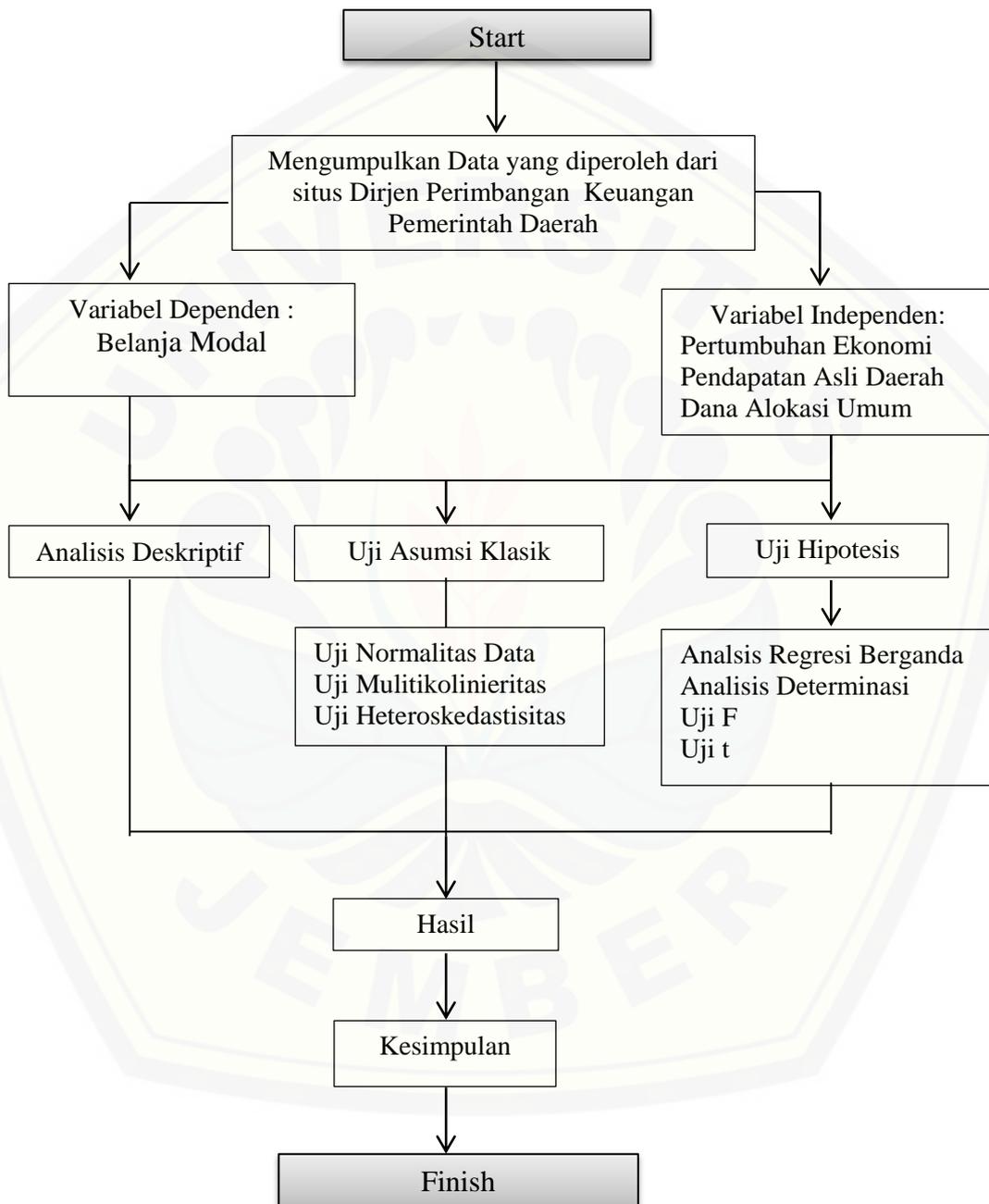
Untuk Uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung dengan t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq +t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak,
- Jika $t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > +t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan $(n-k-1)$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau $\alpha = 5\%$.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambaran mengenai kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di bab 4 menunjukkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya besar kecilnya pendapatan asli daerah tidak akan mempengaruhi pengalokasian belanja modal.
3. Dana Alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya besar kecilnya dana alokasi umum tidak akan mempengaruhi pengalokasian belanja modal.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu data yang peneliti ingin teliti seharusnya adalah alokasi anggaran tahun 2017, namun peneliti menggunakan laporan realisasi anggaran tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan laporan realisasi anggaran tahun 2017 belum dipublikasikan oleh situs Direktorat Jendral Kementerian Keuangan, sehingga peneliti menggunakan data tahun 2016.

5.3 Saran

Saran dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk Bagi peneliti yang selanjutnya supaya teliti dalam proses pengambilan data, karena data yang dipublikasikan oleh situs Direktorat Jendral Kementerian Keuangan terdapat banyak kriteria laporan. Sebaiknya juga menambah periode

dan menambah faktor lain yang mempengaruhi belanja modal untuk memperoleh hasil yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mujib. 2016. Tembus Rp 12,5 Triliun, Realisasi PAD Jatim Jauh Lampau Nasional. Sumber: <http://surabaya.tribunnews.com/2016/01/04/tembus-rp-125-triliun-realisasi-pad-jatim-jauh-lampau-nasional>.
- Ardhani, Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Ekonomi dan Perdagangan: Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota). <https://jatim.bps.go.id/>.
- Devita, Andri. Delis, Arman. Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol. 2 No. 2.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data series keuangan daerah setelah TA 2006. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ichsan, Randy. 2013. Teori Keagenan (*Agency Theory*). Sumber : <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/>.
- Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Kholifah, Inayatul. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Luas Wilayah Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan). Skripsi. Jember : Universitas Jember.

- Martini, Ni Luh Dina Selvia. Wayan, Cipta. Suwendra, I Wayan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume 2 Tahun 2014.
- Mayasari, Luh Putu Rani. Sinarwati, Ni Kadek. Yuniart, Gede Adi. 2014. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vo. 2 No. 1.
- Mufida, Binti Amaliyah. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5 No. 6.
- Muarif, Samsul. 2017. Daftar Kota di Jawa Timur Berdasarkan Pendapatan Per Kapita. Sumber: <http://blogkotakita.blogspot.com/2017/02/daftar-kota-di-jawa-timur-berdasarkan-pendapatan-per-kapita.html>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priambudi, Wimpi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ryo, STI. 2017. Tahun 2016, Ekonomi Jatim Tumbuh 5,55 Persen. Sumber: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tahun-2016-ekonomi-jatim-tumbuh-5-55-persen>.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung. Alfabeta.

Sulistiyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Sunyoto, Danang. 2011. *Parctik SPSS untuk Kasus, dilengkapi Contoh Penelitian Bidang Ekonomi*. Nuha Medika: Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Zainuddin. 2017. Akhir 2017 Pendapatan Per Kapita Penduduk Jatim USD 4.030. Sumber: <http://kadinsurabaya.or.id/read/akhir-2017-pendapatan-perkapita-penduduk-jatim-usd-4-030>.

Lampiran 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		29
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001442
	Std. Deviation	1.47617505E1
Most Extreme Differences	Absolute	.167
	Positive	.167
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		.394

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.211E11	1.560E11		2.700	.012		
X1_PERTEKO NOM	1.269E11	3.673E10	1.234	3.454	.002	.172	5.800
X2_PAD	-.565	.289	-.678	-1.954	.062	.183	5.476
X3_DAU	-.037	.153	-.040	-.243	.810	.823	1.215

a. Dependent Variable: Y_BELANJAMODAL

Lampiran 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.671 ^a	.450	.384	1.56224E11	1.756

a. Predictors: (Constant), X3_DAU, X2_PAD, X1_PERTEKONOM

b. Dependent Variable: Y_BELANJAMODAL

Lampiran 5

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.988E23	3	1.663E23	6.813	.002 ^a
	Residual	6.101E23	25	2.441E22		
	Total	1.109E24	28			

a. Predictors: (Constant), X3_DAU, X2_PAD, X1_PERTEKONOM

b. Dependent Variable: Y_BELANJAMODAL

Lampiran 6

Tabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal
Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2016

No	Kabupaten	PAD	DAU	BM
1	Kab. Bangkalan	165.985.223.860	1.012.242.530.000	463.236.819.553
2	Kab. Banyuwangi	307.162.563.269	1.341.343.454.888	636.962.473.317
3	Kab. Blitar	195.222.122.211	1.128.511.321.000	620.247.031.175
4	Kab. Bojonegoro	290.865.096.993	949.118.065.000	1.231.552.841.900
5	Kab. Bondowoso	138.315.390.209	926.596.442.000	384.252.647.849
6	Kab. Gresik	924.976.298.356	923.469.024.000	606.589.707.785

7	Kab. Jember	485.081.853.159	1.709.892.845.000	610.093.120.442
8	Kab. Jombang	309.510.453.310	1.111.301.450.000	429.310.048.687
9	Kab. Kediri	291.774.545.930	1.242.230.783.000	688.071.836.119
10	Kab. Lamongan	317.130.114.465	1.166.655.654.000	379.128.541.454
11	Kab. Lumajang	177.205.178.000	990.248.409.000	405.622.452.195
12	Kab. Madiun	151.441.496.115	893.565.762.000	385.808.472.489
13	Kab. Magetan	145.800.000.000	916.052.436.000	258.982.846.688
14	Kab. Malang	394.872.007.215	1.613.161.777.000	495.789.062.756
15	Kab. Mojokerto	413.772.405.625	991.180.363.000	506.767.288.035
16	Kab. Nganjuk	280.808.583.917	1.078.695.643.000	561.696.854.824
17	Kab. Ngawi	161.921.573.113	1.058.208.375.000	352.290.253.304
18	Kab. Pacitan	109.873.267.804	807.907.686.000	282.896.370.831
19	Kab. Pamekasan	142.771.055.751	862.935.567.000	539.731.018.114
20	Kab. Pasuruan	452.457.062.487	1.200.611.830.000	786.503.330.514
21	Kab. Ponorogo	212.719.797.000	1.062.582.799.000	406.858.809.602

22	Kab. Probolinggo	201.794.363.664	977.570.137.000	314.641.715.154
23	Kab. Sampang	120.965.331.272	827.952.746.000	515.916.542.002
24	Kab. Sidoarjo	1.203.782.695.817	1.225.261.302.000	740.478.438.266
25	Kab. Situbondo	163.808.258.580	821.084.393.000	361.049.966.585
26	Kab. Sumenep	169.032.544.087	1.110.487.853.000	339.209.913.564
27	Kab. Trenggalek	142.209.750.000	901.379.781.000	382.192.707.964
28	Kab. Tuban	300.384.944.112	1.046.758.509.000	390.280.332.700
29	Kab. Tulungagung	240.482.563.976	1.172.557.802.000	302.071.320.333

Lampiran 7

Distribusi PDRB Terhadap PDRB 29 Kabupaten adhk 2010 (Persen)

NO	Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi(2016)
1	Kab. Bangkalan	1.20
2	Kab. Banyuwangi	3.30
3	Kab. Blitar	1.55
4	Kab. Bojonegoro	4.02
5	Kab. Bondowoso	0.83
6	Kab. Gresik	6.04
7	Kab. Jember	3.27

8	Kab. Jombang	1.70
9	Kab. Kediri	1.77
10	Kab. Lamongan	1.66
11	Kab. Lumajang	1.38
12	Kab. Madiun	0.79
13	Kab. Magetan	0.80
14	Kab. Malang	4.10
15	Kab. Mojokerto	3.47
16	Kab. Nganjuk	1.10
17	Kab. Ngawi	0.83
18	Kab. Pacitan	0.67
19	Kab. Pamekasan	0.69
20	Kab. Pasuruan	6.26
21	Kab. Ponorogo	0.87
22	Kab. Probolinggo	1.44
23	Kab. Sampang	0.89
24	Kab. Sidoarjo	8.32
25	Kab. Situbondo	0.82
26	Kab. Sumenep	1.57
27	Kab. Trenggalek	0.78
28	Kab. Tuban	2.75
29	Kab. Tulungagung	1.65